

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Menurut Piven dan Cloward dalam Edi Suharto (2013) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial. Secara umum, pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Di Indonesia sendiri Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. BPS Jawa Barat menyebutkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun sebanyak 17.360 orang dari posisi Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan posisi September 2021 jumlah penduduk miskin September 2022 mengalami kenaikan 0,01 persen poin. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,48 persen, naik menjadi 7,52 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 9,76 persen, turun menjadi 9,75 persen pada September 2022.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung pada 2021 mencapai 6,91% atau 263.600 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem berada diangka 2,46% atau sebanyak 93.480 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,3%, dari 1,78% di tahun 2021 menjadi 1,48 % di tahun 2022. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam acara Rakor bulan Januari di Bandung, Kelurahan Cibeunying memiliki jumlah penduduk sekitar 27.000 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin 4.056 KK terhitung per tahun 2022. Berdasarkan data tersebut angka kemiskinan perlu adanya program pengentasan kemiskinan.

Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mewujudkan hak atas kebutuhan dasar warga miskin dan tidak mampu di negara. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, pemerintah membuat program penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial untuk mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program bantuan sosial tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non tunai atau yang disebut dengan BPNT adalah program bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai

ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan Non tunai di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Pada akhir tahun 2019, program BPNT di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT.

Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan bahwa, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program BPNT akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pangan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

Menurut Subagyo dalam Budiani (2009:53) Efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan, suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan dari perumusan tujuan yang ingin dicapai sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan kegiatan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan program BPNT haruslah diukur untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dari tugas dan tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil akhir dari pelaksanaannya.

Kecamatan Cimenyan merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Kecamatan Cimenyan ini terbentang dari Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (sebelah barat) sampai ke Oray Tapa (sebelah timur). Wilayah Kecamatan Cimenyan terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan. Kelurahan Cibeunying terdaftar sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan informasi dari Kantor Kelurahan, program ini pertama kali masuk yakni pada tahun 2018. Jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 614 KK. Pelaksanaan program Sembako di Kelurahan Cibeunying dilaksanakan di 1 E-Warong PKH/BPNT/ Sembako terdapat di Kelurahan Cibeunying itu sendiri. Mekanisme pelaksanaannya dan penyalurannya cukup mudah, dengan cara setiap KPM yang telah terdaftar dan memiliki kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang sudah berisi saldo kemudian dibelanjakan ke E-Warong yang telah disediakan. Selanjutnya dari pembelian itu KPM mendapatkan bahan pangan yang berupa beras, telur, sayur mayur, buah-buahan dan ikan.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan penyelenggaraan program BPNT ini di antaranya, beberapa keluarga penerima manfaat merasa bahan pangan yang diterima tidak sesuai jumlah, kualitas dan harga serta sering terjadinya keterlambatan pencairan bantuan yang seharusnya sebulan sekali menjadi di akumulasikan dalam dua atau tiga bulan, selain itu jarang

diadakannya pemantauan program guna melihat permasalahan mengenai pelaksanaan penyaluran program BPNT.

Berdasarkan uraian dan indikasi di atas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Mengingat pentingnya pelaksanaan dari sebuah program sosial pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga di perlukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Atas dasar hal tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?” selanjutnya rumusan masalah tersebut di uraikan dalam sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana Ketepatan Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?

4. Bagaimana Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana Pemantauan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara empiris mengenai sub-sub rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden.
2. Ketepatan Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
3. Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
4. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
5. Pemantauan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik pekerjaan sosial di bidang pelayanan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran serta sebagai masukan dalam rangka mengetahui bagaimana menilai efektivitas yang ditimbulkan dari suatu program yang dijalankan seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagaimana tercantum dalam pedoman penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Bab ini memuat Penelitian Terdahulu, Teori yang Relevan dengan Penelitian dan Kerangka Pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat Desain Penelitian, Sumber Data, Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian, identifikasi sumber dan analisis masalah.

BAB V : USULAN PROGRAM

Bab ini memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan dari program tersebut.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA